

## **PENGARUH LETAK, LUAS DAN BENTUK TERHADAP PEMERINTAHAN NEGARA SERTA BATAS NEGARA INDONESIA**

**Nathasia Angelina Saragi**

*Email: angelinanathasia12@gmail.com*  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

**Kustiawan**

*Email: kustiawan@umrah.ac.id*  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

**Diah Ayu Sholeha**

*Email: diahayuuee@gmail.com*  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

**Desma Tri Anggriani**

*Email: desmatrianggriani12@gmail.com*  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

**Omi**

*Email: omio6877@gmail.com*  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji*

### ***Abstract***

*This research aims to analyze the influence of location, area and form on state government based on the geographical context of Indonesian politics. The analysis was carried out by reviewing papers containing descriptions of the influence of the location, extent and shape of Indonesia in terms of political geography. The discussion begins with the influence of Indonesia's astronomical and geographical location, the size of its territory, islands and seas, as well as the shape of its landmass on state government. The research results show that geographical location, area and shape have positive and negative influences on Indonesian government in various political, economic, social and cultural aspects.*

*Keywords: Influence of Location, Area, Shape and Country Boundaries*

## Abstrak

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengaruh letak, luas dan bentuk terhadap pemerintahan negara berdasarkan konteks geografis politik Indonesia. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa pengaruh letak, luas dan bentuk Indonesia secara geografis politik Indonesia adalah berpengaruh pada letak astronomis dan geografis Indonesia, luas wilayah, kepulauan dan laut yang dimiliki, serta bentuk daratannya terhadap pemerintahan negara. Kemudian, letak, luas dan bentuk geografis memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pemerintahan negara Indonesia dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci: Pengaruh Letak, Luas, Bentuk dan Batas Negara

---

**Submitted: 20-08-2024 | Accepted: 25-08-2024 | Published: 31-08-2024**

---

### 1. Pendahuluan

Sesuai dengan wilayah geologinya, Kepulauan Indonesia terletak di antara Daratan Asia dan Daratan Australia, serta antara Laut Hindia dan Laut Pasifik. Oleh karena itu, domain Indonesia berada pada titik persimpangan dalam hal iklim dan ekonomi. Letak wilayah Indonesia yang berada di antara Daratan Asia dan Daratan Australia serta antara Laut Pasifik dan Laut Hindia menjadikan Indonesia berada pada posisi kunci dan produktif. Keunggulan yang diambil berdasarkan wilayah geologinya adalah Indonesia terletak di antara dua daratan dan dua lautan, sehingga dimungkinkan menjadi persimpangan aktivitas dunia, baik perdagangan maupun aktivitas lautan. Menjadikan Indonesia sebagai titik persimpangan latihan keuangan dunia, antara pertukaran antara negara mekanik dan negara berkembang. Negara-negara tersebut mencakup Jepang, Korea, dan RRT dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Karena terletak di antara dua lautan yang sangat diperdagangkan, ditambah dengan banyaknya tanaman hijau, fauna dan aset mineral, hal ini akan sangat mendukung pertukaran dan meningkatkan sumber perdagangan terpencil negara tersebut. (Kemlu, 2018).



Gambar 1. Letak Geografis Indonesia

Keunggulan wilayah geologi Indonesia adalah sengaja ditemukan sehingga memberikan dampak bagi Indonesia, baik secara finansial, sosial, dan sosial. Karena wilayah Indonesia sangat penting, wilayah ini dinavigasi oleh jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Negara-negara tersebut mencakup negara-negara Asia Timur dan negara-negara Eropa, Timur Tengah dan India. Serta kursus pertukaran antara Asia ke Australia dan Selandia Modern. Pertukaran kapal dari Jepang, China dan negara-negara Asia Timur lainnya menuju ke Eropa melalui Indonesia dan sebaliknya. Memang walaupun terlihat ribet, kalau diurai, ini merupakan jalur pelayaran terbanyak di jalur pelayaran di dunia adalah menghubungkan Amerika Utara, Eropa dan Asia Pasifik melalui Terusan Suez, Selat Malaka dan Terusan Panama (Putri, 2019).

Dalam kehidupan masyarakat universal tentu tidak lepas dari permasalahan hukum. Di Indonesia, salah satu persoalan legitimasi universal yang sering muncul adalah persoalan batas wilayah Zona Ekonomi Terpilih yang berada dalam wilayah pinggiran negara ini. Indonesia baru meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Parthiana, 2014).

Letak geografis, luas wilayah dan bentuk daratan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik dan dinamika pemerintahan negara. Ketiga faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung ikut menentukan jalannya sistem politik, ekonomi dan interaksi sosial budaya di sebuah negara. Hal ini juga berlaku bagi konteks Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh letak, luas dan bentuk

terhadap pemerintahan negara berdasarkan konteks geografis politik Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara geografi dengan dinamika politik di Indonesia.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap buku yang berjudul Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan, yang berisi uraian tentang pengaruh letak, luas dan bentuk Indonesia secara geografis politik. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 1) Membaca dan memahami seluruh isi makalah, 2) Menginventarisasi temuan terkait pengaruh ketiga faktor geografis tersebut dalam berbagai aspek, 3) Melakukan sintesa dan analisis mendalam terhadap temuan-temuan tersebut, 4) Menarik kesimpulan mengenai pengaruh faktor-faktor geografis terhadap pemerintahan negara Indonesia. Validitas hasil ditunjang dengan mengacu pada kajian pustaka terdahulu.

### **4. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua memiliki pengaruh positif seperti memudahkan hubungan internasional, tetapi juga negatif seperti menjadi laluan aktivitas kriminal, maka budaya bangsa lain yang tidak sejalan dengan Indonesia, masuk dan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan tanpa pandang bulu. Selain itu, Indonesia juga tidak berdaya membawa barang-barang terlarang, seperti senjata api dan narkoba. Karena area vitalnya. Karakteristik kepulauan juga berimplikasi positif seperti keanekaragaman budaya, namun negatif antara lain kesulitan pengawasan dan pembangunan. Luas wilayah dan laut berpengaruh positif pada sumber daya alam, tetapi negatif karena wilayah tersebut menjadi perebutan. Bentuk daratan dan cuaca tropis mempengaruhi potensi sumber daya hayati namun juga kerentanan terhadap perubahan iklim

Indonesia sebagai negara maritim akhir-akhir ini pasti telah menggoyahkan negara-negara lain sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan aset-aset yang

dimilikinya, khususnya aset kelautan. Pengaruh Indonesia di bidang kelautan sangatlah penting. Biasanya karena NKRI merupakan negara yang memiliki zona lautan yang sangat luas dan potensi atau aset kelautan yang melimpah. Tanpa pengaruh, hal itu justru menggerogoti keberadaan aset dan bisa mengakibatkan kerugian (Simarmata, 2017). Sebagai negara maritim, batas wilayah Indonesia mayoritas berada di lautan. Pengaturan batas tersebut telah diatur United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Ada tiga kategori batas laut yang diatur dalam hukum laut internasional yaitu:

1. Samudera regional, yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di zona ini, Indonesia mempunyai kekuasaan penuh (sway) atas seluruh 22 aset bersama. Indonesia mempunyai perbatasan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
2. Daratan, zona ini terdiri dari dasar laut dan sampai di bawahnya, mulai dari lautan regional hingga 200 mil laut dari standar pulau. Indonesia seolah-olah mempunyai hak otonom untuk menyelidiki dan menyalahgunakan aset mineral dalam rentang tersebut. Bagaimanapun pemanfaatan daratan oleh negara lain harus atas persetujuan Indonesia. Negara-negara yang mempunyai batas laut dengan india adalah India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan Papua Nugini.
3. Select Financial Zone (ZEE), diukur 200 mil laut dari standar pulau. Sama seperti negara daratan, Indonesia seolah-olah mempunyai hak yang sangat penting dalam hal ini atas penyelidikan, penyalahgunaan dan pelestarian aset-aset umum, khususnya perikanan.

Secara umum, geografi mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan ruang wilayah dan sumber daya alam untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi pemerintahan Indonesia menurut Arriany, (2020).

- **Letak Strategis dan Ketergantungan Kelautan:**

Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik, yang membuatnya memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga pengelolaan ruang wilayah dan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

- **Iklim dan Keterbatasan Pengawasan:**

Posisi Indonesia yang berada di persimpangan menyebabkan terjadinya pertukaran latihan, dimana kawasan ini merupakan jalur kegiatan universal dan tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar antara Asia Timur dan Asia Selatan, Asia Barat dan Afrika serta Eropa. Pengawasan pemerintah yang terbatas dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti perpindahan penanda batas negara, kerusakan alam, dan berbagai pelanggaran perbatasan.

- **Keterkaitan dengan Politik Hukum dan Kesejahteraan:**

Penyelenggaraan wilayah perbatasan dalam kerangka hukum nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Namun, kebijakan politik hukum yang tidak seimbang antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sarana prasarana.

- **Legitimasi dan Hubungan dalam Negosiasi:**

Dalam negosiasi, setiap aktor harus mampu mewajibkan antarmuka negara tanpa menimbulkan permasalahan atau bentrokan. Keaslian yang kuat sangat penting dalam menyetujui solusi terhadap suatu masalah yang ada. Hubungan yang baik antar negara juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah dan merealisasikan keuntungan.

- **Keterkaitan dengan Sosial Budaya:**

Letak wilayah Indonesia yang dekat dengan daratan Asia menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia beragam, sehingga banyak menerima dampak dari daratan tersebut. Terlebih lagi, globalisasi transportasi dan komunikasi membuat sosial budaya masyarakat daratan Eropa dan daratan Amerika semakin mempengaruhi perbedaan sosial budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia mungkin merupakan masyarakat yang majemuk, dimana Indonesia mempunyai perbedaan dialek, agama, pekerjaan, suku, dan lain sebagainya.

Dalam sintesis, letak geografis Indonesia mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan ruang wilayah dan sumber daya alam untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan sumber daya alam, serta membangun kerjasama yang baik dengan negara lain untuk menyelesaikan berbagai masalah perbatasan.

## **5. Kesimpulan**

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Hindia dan Pasifik) membawa pengaruh positif dan negatif bagi pemerintahan Indonesia. Secara positif, lokasi strategis ini memudahkan hubungan internasional Indonesia. Namun di sisi lain, posisi ini juga menjadi laluan bagi aktivitas kriminal lintas batas seperti penyelundupan senjata api dan narkoba. Selain itu, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, seperti pergaulan bebas, juga mudah masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan juga membawa implikasi ganda. Secara positif, keberagaman budaya dapat terbentuk. Namun secara negatif, pengawasan dan pembangunan infrastruktur menjadi sulit dilakukan. Luas wilayah dan laut Indonesia yang melimpah memberikan potensi sumber daya alam yang besar, namun juga berisiko menjadi rebutan dengan negara lain.

Sebagai negara maritim, Indonesia harus menegakkan kedaulatan di wilayah laut untuk melindungi sumber daya alamnya. Hal ini diatur dalam UNCLOS 1982, yang membagi zona laut Indonesia menjadi laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah harus mengelola wilayah ini dengan mempertimbangkan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

Secara umum, letak geografis Indonesia yang strategis namun rentan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemerintahan. Pemerintah harus mampu memanfaatkan potensi positif, sementara meminimalisir risiko negatif, melalui kebijakan yang seimbang antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Kerjasama internasional juga penting untuk menyelesaikan berbagai masalah perbatasan dan pemanfaatan sumber daya alam.

## Daftar Pustaka

- Arriany, I., Ibrahim, N., & Sukardjo, M. (2020). Pengembangan modul online untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 7(1), 52-66.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Laut Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Buku Kompas.
- Parthiana, I Wayan. 2014. "Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia". Bandung: Yrama Widya. h.69.
- Prasetya, Perdana, Sukma. (2014). *Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Diterbitkan Oleh Penerbit Ombak (anggota IKAPI), 2015 Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292.
- Putri, A. S. (2019) Kompas. Diambil kembali dari Kompas: [https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/130000469/arti-zona-ekonomi-eksklusif-dan-dasar hukumnya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/130000469/arti-zona-ekonomi-eksklusif-dan-dasar-hukumnya?page=all) (Diakses pada 3 Juni 2024)
- Simarmata, P. (2017). Hukum Zona Ekonomi Eksklusif. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(2). 108-123.
- UNCLOS. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. In *The Law of the Sea: Progress and Prospects*.